

**CIVIC VIRTUE KETAATAN WARGA TERHADAP NEGARA DALAM  
GAGASAN MAUPUN PRAKTIK SEBAGAI TANTANGAN INDONESIA**

**Samson Ganda J. Silitonga dan Edy Syah Putra Sihombing**

Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia

E-mail: samson.ganda@unpar.ac.id dan edysyahputrashb@unpar.ac.id

**Diterima:**

19 Agustus 2021

**Direvisi:**

08 September  
2021

**Disetujui:**

15 September  
2021

**Abstrak**

Untuk memahami Indonesia sekarang, haruslah mengerti empat hal ini: bagaimana ekonomi politik diatur, bagaimana perkembangan organisasi sosial, respon dan sejarah masyarakat. Tanpa memahami keempatnya sekaligus, memahami Indonesia hanyalah kumpulan kosa kata. Tetapi terdapat suatu hal yang harus diperhitungkan dalam kontelasi ekonomi politik Indonesia, khususnya dalam kaitan dengan hubungan Negara – Masyarakat, yakni persoalan Civic Virtue. Apakah warga taat kepada negara terutama dalam menghadapi Covid-19, persoalan ini menjadi relevan dan kontekstual. Dalam bentang sejarah Indonesia modern sejak 1945, harus dikatakan bahwa persoalan ini belum dianggap penting. Yang utama adalah tindakan negara terhadap masyarakat-nya, sementara masyarakat harus mampu merasakan pengaruh negara, utamanya dalam hal keadilan & kesejahteraan ekonomi. Jika tidak, maka negara dianggap kurang maksimal. Apakah paradigma itu dibenarkan. Berikut ini kami melakukan eksplorasi gagasan tentang siapa itu warga yang harus taat kepada negara. Memang tidak mudah, dan kami harus pula menyebar questioner untuk menjangring pendapat umum, terutama dari kalangan mahasiswa. Kalangan inilah yang kami anggap tidak terlalu mengerti sejarah, dan terutama dengan cara berpikrit pragmatis, khas milenial.

**Kata kunci:** Negara, Warganegara, Ketaatan, Politik, Sejarah

**Abstract**

*To understand Indonesia now, you must understand these four things: how political economy is regulated, how the development of social organizations, the response and the history of society. Without understanding all four at once, understanding Indonesia is just a collection of vocabulary. But there is something that must be taken into account in the kontelasi of Indonesia's political economy, especially in relation to state-community relations, namely the issue of Civic Virtue. Are people obedient to the state? Especially in the face of Covid-19, this issue becomes relevant and contextual. In the history of modern Indonesia since 1945, it must be said that this issue has not been considered important. The main thing is the actions of the state against its people, while the community must be able to feel the influence of the state, especially in terms of justice & economic welfare. If not, then the state is considered less than optimal. Is the paradigm allowed? Here we explore the idea of who it is citizens who must obey the state. It is not easy, and we also have to spread questioner to capture public opinion, especially among*

*students. These are the people we consider not very understanding of history, and especially in a pragmatic, typical millennial way.*

**Keywords:** Country, Citizen, Obedience, Politics, History

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. Tidak kurang dari 6000 pulau menjadi bagian tidak terpisahkan dari Indonesia, pernah dijajah Belanda dari abad 16 hingga 20, negara kepulauan ini menyatakan kemerdekan pada 17 Agustus 1945 meski baru diakui pada 27 Desember 1949 (Zainal, 2018). Menurut Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, kata Indonesia berasal dari etnolog Jerman, Jordan, yang saat itu menjalani studi di Jerman. Saking dekatnya dengan India, Jordan menyebut pulau-pulau itu ‘indos’ dan ‘nesos’ (berasal dari bahasa Yunani) yang berarti Pulau. Maka jadilah Indonesia, bukan sebagai Austronesia meskipun sebagian besar penduduknya (dari Tengah hingga Barat) termasuk rumpun Austronesia. Masih kata Soekarno, Indonesia adalah seluruh bekas jajahan Belanda sejak tahun 1596. Sebab itu pula Soekarno menolak mengambil alih Timor Leste yang merupakan jajahan Portugis (Hasim, 2018). Jika Soekarno mampu memproklamkan Kemerdekaan Indonesia hanya 2 (dua) hari setelah berakhirnya Perang Asia Pasifik, harus dikatakan bahwa determinasi batas-batas bekas Kolonialisme Belanda harus dilihat luar biasa positif. Betapa tidak, sebesar Indonesia ini sama dengan 42 Negara di kawasan Eropa. Belum lagi jika melihat keragaman masyarakatnya yang oleh Hildred Geertz pernah digambarkan begini. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnis di Indonesia, masing-masing mempunyai identitas kultural sendiri dan memakai lebih dari 250 jenis bahasa lokal. Termasuk hampir semua Agama dunia diwakili oleh agama di sini, selain Kepercayaan asli yang banyak sekali jumlahnya (Aziz, 2020). Demi menggambarkan pluralitas masyarakat tersebut, pendiri Republik ini dengan meyakinkan mengumandangkan sebuah motto nasional, *Bhinneka Tunggal Ika*; sebuah motto yang dikutip dari zaman Hindu - Majapahit. Kendati demikian, negara sebesar dan semajemuk ini membutuhkan lebih dari sekadar motto. Tidak lain dan tak bukan, yang dibutuhkan adalah sebuah ideologi persatuan. Sejak tahun 1926 Soekarno telah ‘menemukan’ bahwa setidaknya tiga ideologi tumbuh subur dalam masyarakat yang sedang mengalami penjajahan (Latif, 2013).

Ideologi merupakan instrumen negara untuk mengukuhkan dirinya dan sekaligus menjadi landasan ketaatan masyarakat terhadap negara (Kariyadi, 2017). Tanpa ideologi negara tidak kuat, bahkan tidak mungkin berdiri. Tanpa ideologi pula instrumen masyarakat untuk taat pada negara tidak ada atau nihil sama sekali. Dari hasil penelusuran Soekarno tersebut, juga secara teoritik, harus dikatakan bahwa ideologi teramat penting untuk masyarakat Indonesia (Alfianita, 2019). Salah satu simpulan yang dapat ditarik dari setiap keadaan dan proses politik yang ditempuh tokoh-tokoh pergerakan selama periode pemerintahan Jepang, potensi kekuatan warga sebenarnya berusaha digarap secara maksimal namun di sana-sini terjadi tumpang-tindih. Kenyataan itu tidak bisa dijelaskan hanya pada bingkai kekurangsiapan para tokoh secara psikologis atau rentang waktu yang relatif singkat, tetapi juga akibat pemahaman dan respon terhadap situasi yang tidak (mungkin) permanen (Yosita & Nurcahya, 2015). Hal itu pula yang membuat radikalisme warga menguat dengan sendirinya tanpa dipengaruhi sepak terjang tokoh-tokoh pergerakan. Jepang mungkin sama sekali tidak menyadari bahwa

milisi-milisi bersenjata bentukannya merupakan dimensi baru dalam sejarah pergerakan rakyat di seluruh Hindia yang nanti balik menyerang. Kendati kurang memiliki peran politis, radikalisme pemuda yang disanjung Ben Anderson itu bertolak dari milisi-milisi ini. Sayangnya, seorang radikal kawakan paling berbahaya, Tan Malaka, baru tiba dari rantainya setelah 1942. Itupun tak langsung memasuki kancah revolusioner, dengan alasan karena ingin membaca situasi dengan seksama. Tan Malaka memilih berdiam sambil menyusun konsep perjuangan yang dianggap lebih berarti bagi rakyat bila perang telah usai, dari suatu sudut kecil di sebelah Timur Batavia.

Kata *Virtue* berasal dari Bahasa Latin dan barakar dari kata *Vir* yang berarti Kekuatan. *Virtue* bersandar pada sifat maskulin, yang umum diterjemahkan sebagai Keutamaan, Kebajikan ataupun Kebaikan. Kata *Virtue* biasa digunakan dalam konteks pengertian Nilai (*Value*), menjelaskan Keutamaan (tertentu) yang mendorong tindakan atau perilaku manusia.

Manusia selalu berusaha memaknai diri, hidup maupun tindakannya. Sebagai anggota *the Social*, manusia lahir, bergerak dinamis sekaligus bertumbuh dalam masyarakat. Manusia lahir dalam lingkungan sosial yang sudah menjadi (*given*) sehingga harus dikatakan bahwa manusia Ada dalam Ruang sekaligus Waktu yang berproses. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, setiap manusia (sebagai individu) pasti berada dalam garis kehidupan yang terdiri dari Ruang dan Waktu. Sejak dari rahim ibu, lahir, tumbuh dan akhirnya mati (berakhir). (Slamet, 2016), filosof fenomenologi Jerman, mengistilahkan garis kehidupan sebagai *Sein zum Tode* (Ada menuju Kematian). Berproses menuju titik akhir dan tidak akan pernah terulang.

Setiap peristiwa, setiap keadaan dan tiap-tiap tindakan memang tidak pernah terulang. Setiap detik adalah detik yang unik dan baru. Karena itulah Manusia selalu berupaya membuat Ruang dan Waktu yang menghidupi ~ sekaligus dihidupinya bernilai. Hari Sabtu besok berbeda dari Sabtu pekan lalu. Solusi hari ini berbeda dari solusi kemarin. Begitu pula proses berpacaran berbeda dengan pernikahan. Momen kelahiran putra sulung pasti berbeda dari momen kelahiran putra bungsu.

Berdasarkan dimensi waktu, pendiri Psikoanalisis, Sigmund Freud (1856-1939) menyatakan bahwa individu bisa saja terjebak pada penilaian hidup yang terbatas atau menyerap Nilai terbatas pula. Jebakan yang dimaksud ialah (1) Terkurung dalam Masa Kini; (2) Terkurung Masa Lalu; dan (3) Terkurung dalam Masa Depan.

Yang disebut pertama, menjalani hidup tanpa visi masa depan. Quintus Horatio Flaccus (65 s.zb – 8 z.b) terkenal dengan ucapannya “*Carpedeim quam minimum credulo postero*”, yang kemudian menjadi motto jebakan pertama. Menurut Freud, “Nikmati hari ini dan percaya sesedikit mungkin tentang hari esok” justru melahirkan moral hazard (mumpungisme) selain tentu perilaku egois. Hanya memperhatikan kenikmatan pribadi (*pleasure principle*), keluarga atau kelompok sendiri sebagai pemuas hidup. Sedangkan yang kedua terkurung dalam masa lampau, terjebak pada pengagung-agungkan masa lalu. Dalam kondisi begitu sejarah dinyatakan tidak pernah berubah. Parahnya lagi, jebakan ini memaksa generasi sekarang untuk tunduk pada situasi masa lalu atau minimal mengidealkannya. Sedangkan jebakan ketiga lebih sering menunda (*prokastinasi*); yang berakibat sering bergerak hanya jika *deadline* telah di depan mata.

Penilaian situasi atau tindakan berdasarkan dimensi waktu parsial (sepotong-potong) tentu menunjukkan sikap ekstrim; sementara hidup yang bernilai timbul dari penghayatan yang mencakup tiga dimensi sekaligus. Dalam konteks hidup sosial bermasyarakat, pengertian Nilai tentu tidak terlalu jauh dari uraian di atas, yakni mengenai apa yang harus dicapai, diraih atau diwujudkan dalam hidup melalui tindakan atau perilaku.

Istilah virtue dalam penelitian ini diterjemahkan sebagai Keutamaan. Secara etimologi hal itu mungkin kurang memadai, tetapi penelitian ini mencoba melakukan eksplorasi lebih dalam. Istilah Nilai sebagai Keutamaan berasal dari konteks peradaban Yunani. Konteks peradaban Yunani menyebut virtue sebagai arete. Arete dalam perspektif peradaban Yunani diterjemahkan dan diuji dalam konteks pertanyaan tentang apa dan siapa manusia, serta bagaimana manusia menjadi manusiawi.

Menurut peradaban Yunani, manusia ideal ialah manusia yang mampu menyelaraskan jiwa dan tubuh (badan)-nya. Arete adalah idealisasi diri, yang dengan itu manusia berproses dan dibentuk menjadi manusia ber-keutamaan dan berorientasi mengejar sesuatu yang bernilai. Demikianlah konsep dasar manusia, yakni menjadi manusia yang bernilai atau dihidupi oleh keutamaan sehingga mencapai kebahagiaan (eudaimonia). Mengenai proses ini Sokrates mulai dengan mengajukan pertanyaan dasar: bagaimana seharusnya manusia hidup. Atau hidup macam apa yang dapat dikatakan sebagai hidup yang bahagia dan bagaimana manusia memperolehnya.

Melalui analisis yang luas disodorkanlah satu pernyataan penting sebagai benang merah terhadap teori Goldstone tadi: Negara dapat menuju jurang kegagalan apabila organ-organ dan aktor-aktor politik yang bermain di dalamnya tidak dapat bekerja sama secara mandiri dan bebas, apalagi jika masing-masing mempunyai kepentingan berbeda. Belum lagi ketika aktor-aktor politik yang menguasai negara bertambah atau berganti pada momen tertentu sementara konfrontasi dengan warga dan aktor-aktor luar belum terselesaikan. Akibatnya, negara kehilangan kontrol dan tidak mampu lagi mengendalikan otoritas. Dan dalam kondisi yang tidak terkendali itu, secara perlahan, negara mengundang revolusi menghampiri dirinya. Situasi inilah, yang menurut Goldstone, disebut State Breakdown! (negara menjelang ambruk).

Bagaimana situasi negara pada saat state breakdown? Bagaimana pula negara merespon situasi? Menurut Goldstone, terdapat tiga kondisi aktif dan yang saling terkait yang mendorong munculnya ketidak-taatan. Pertama, negara dilanda krisis ekonomi yang parah. Krisis ekonomi bisa datang setiap waktu akibat merosotnya nilai uang, tingginya pengangguran dan pengaruh perang. Tetapi dalam kasus state breakdown, krisis ekonomi adalah krisis yang hampir tidak dapat diatasi seperti biasanya dan “hanya” tersedia satu solusi. Sayangnya, penguasa tak menghendaki solusi tersebut (Huseini, 2016). Kedua, konflik aktor-aktor politik telah mencapai titik kulminasi. Konflik yang dimaksud bukan hanya disebabkan perbedaan ideologi atau rebutan jabatan-jabatan penting. Jika masalahnya sekadar itu, negara terbiasa menyelesaikan dengan cross cutting atau kompromi. Pada konteks ini, konflik elit dipengaruhi kesadaran untuk menciptakan pembaruan politik-ekonomi. Namun yang lebih penting, secara nasional, negara telah kehilangan kemampuan mengendalikan otoritas dalam sebuah konfrontasi dengan aktor-aktor yang secara politik mempunyai kekuatan ekstra. Ketiga, terjadinya mobilisasi massa besar-besaran melebihi aksi yang sudah-sudah. Sebagian kelompok elit yang bertikai boleh jadi akan berpihak pada massa. Namun menurut Goldstone, kemungkinan untuk bertindak sendiri melawan pusat kekuasaan juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Apapun pilihannya, negara jelas sedang menghadapi dua musuh sekaligus: massa dan elit yang pernah mendukungnya.

Dalam situasi seperti itu negara biasanya menawarkan kompromi, seolah-olah bersedia memenuhi tuntutan warga dan elit. Jika elit membelot dan menerima tawaran itu, negara boleh jadi akan bertahan. Tetapi Revolusi tinggal menghitung waktu bila mereka tidak menerimanya. Sementara di sisi lain juga ada alternatif pilihan: negara mengabsahkan coup d' etat.

Hari-hari ini kita tahu bahwa ketidak-taatan itu tampak dari situasi menghadapi Covid-19 yang sekaligus menunjukkan perbedaan negara dan masyarakat. Terutama lagi menghadapi libur Lebaran. Negara bilang A sedangkan masyarakat maunya B. Bertentangan dan tidak taat menghadapi Covid-19 dan semakin distingtif. Tetap negara bukanlah negara totaliter sebagaimana diisyaratkan Arendt, bukan pula negara Demokrasi Pluralistik; setidaknya dalam soal mutu atau negara berdemokrasi dalam soal kualitas.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini sepenuhnya berada dalam naungan riset kualitatif. Namun demikian, kami melakukan penelitian kuantitatif. Paling tidak untuk menjaga keseimbangan kedua aspek baik kualitatif maupun kuantitatif. Untuk itu kami memilih dan menyiapkan metode kuesioner yang dibagikan melalui Google Form. Lalu terkumpul sejumlah 1555 Responden yang terdiri dari mahasiswa. Kuesioner dibagikan secara acak (random), dengan 12 pertanyaan yang sepenuhnya terkait judul penelitian.

Sebanyak 59,6% Responden tinggal di kota besar, sejumlah 25,3% tinggal di kota menengah dan 13% tinggal di kota kecil. Sisanya tinggal di desa dan hanya 16 orang yang mengaku berpindah-pindah minimal sekali lima tahun. Responden yang kami harapkan mungkin tidak memenuhi kriteria atau lebih banyak tinggal di kota kecil, tetapi perkembangan kota besar akhir-akhir ini cukup pesat dan 13% bukanlah angka yang terlalu kecil.

Sebanyak 63% responden berada di usia 18-24 tahun, dan hanya 36% berada di luar itu. Artinya, responden terbanyak berada di ambang usia produktif atau minimal dewasa muda (skala psikologi). Hal itu juga ditunjang fakta bahwa 114 orang mengaku berpendidikan SMA – sederajat D-3 dan hanya atau 21,9% responden mengaku berpendidikan sarjana. Itu artinya responden didominasi generasi milenial atau genmil. Dan 100% responden berprofesi sebagai wirausaha atau setidaknya memiliki orang tua yang berprofesi itu.

### **Hasil dan Pembahasan**

Memasuki substansi, 8,2% yang mengaku bahwa ketaatan pada negara tidak dipengaruhi ajaran agama. Berarti 91,8% mengaku bahwa ajaran agama berkontribusi terhadap ketaatan dimaksud. Sebanyak 57,5% merasa taat kepada negara, sedangkan 42,5% merasa tidak taat sebagai warganegara. Pun demikian dengan keluarga, 81% responden merasa keluarganya taat karena pengetahuannya dan 9,6% karena dorongan agama, sedangkan 8,9% karena pekerjaan.

Jawaban responden ini menunjukkan ajaran agama (apapun) memang sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia. Apakah karena masyarakat ini mayoritas beragama Islam? Soal Agama pribadi tidak kami tanyakan pada responden, tetapi dari 42,5% ketidak-taatan merupakan akibat 68,3% pengetahuan, 15,8% karena pekerjaan, 10,8% karena pekerjaan dan selebihnya karena belum berusia 30 tahun. Sedangkan untuk 57,5% yang merasakan ketaatan pada negara, 69,9% menjawab warganegara seharusnya berpartisipasi pada setiap kebijakan negara, dan 20,5% menjawab tindak lanjut ketaatan adalah dengan tidak melakukan korupsi. Kami juga menyediakan jawaban mendoakan pemerintah, tidak demontrasi dan tidak membakar bendera merah-putih.

Cukup besar responden (39%) menjawab Civic Cirtue bukan tanggungjawabnya, 30,1% responden menjawab tergantung situasi dan 24% menjawab sebagian besar rakyat sudah taat pada pemerintah. Ketika ditanyakan yang paling mewakili pendapatnya 32,2% menjawab bahwa taat pada pemerintah merupakan wujud Civic Virtue tetapi bukan kewajiban; 29,5% menjawab ketaatan merupakan kewajiban, dan 'hanya' 20,5% yang menjawab bahwa ketaatan adalah moralitas. Hanya 10,3%

responden yang menjawab dirinya lahir sebagai warga negara maka wajib taat pada negara. Terkait situasi Pandemi Covid-19, 78,3% Responden menjawab bahwa Covid-19 dapat diatasi jika masyarakat taat pada negara. Hanya 18,2% yang menjawab sepenuhnya tergantung kemauan pribadi. Selebihnya menjawab bahwa ketaatan terhadap pemerintah tidak berhubungan sama sekali dengan Covid.

Tidak berlebihan jika Erich Fromm, dalam salah satu karyanya, mengatakan bahwa sejarah umat manusia berawal dari ketidak-patuhan. Begitu dikatakan Fromm sebagai reaksi terhadap Humanisme yang dangkal dan sempit, yang mana atas nama agama manusia rela berbuat apa saja dan ketidak-taatan menjadi sejenis problem psikologis dan moral. Fromm juga mengkritik Humanisme-Marxis yang kedodoran sehingga tidak melihat kenyataan apa adanya dan dianggapnya memaksakan diri.

Sebagai psikolog Humanis-Materialis, Fromm mengkritik keras agama. Tetapi selain itu Fromm juga melakukan hal yang sama terhadap Komunisme. Meskipun kritik terhadap Komunisme dilancarkan akibat perseteruannya dengan Frankfurt School, tetapi apa yang dikatakannya mungkin benar, yakni agama-agama modern sekarang ini (termasuk Islam, agama mayoritas di Indonesia) selalu melancarkan kritik terhadap kemanusiaan, sama seperti Komunisme. Padahal Kapitalisme, sebagaimana dinyatakan Samuel Huntington telah terbukti lebih mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan manusia.

Selain itu harus dikatakan pula bahwa sejarah merupakan peristiwa kehidupan yang terdiri dari berbagai kepentingan, emosionalitas, fenomena, kegetiran, frustrasi, ego, inisiatif, kemenangan, dan bagaimanapun seluruh kenyataan yang menggambarkan aspek-aspek tersebut tidak boleh gagal diterangkan (Marli, 2020). Keinginan dan hasrat terdalam pada diri manusia yang meluap dan merajalela pada saat revolusi tidak mungkin dapat dilihat jika dibingkai dalam hukum sebab-akibat. Dan akhirnya, hanya dari keberhasilan menggambarkan revolusi itulah sejarawan dapat melihat, mengurai dan memaknai kebebasan dan kemerdekaan yang diagung-agungkan manusia. Inilah yang disebut super-ego (Suhendi, 2020).

Selain Fromm, kita juga dapat belajar dari Hannah Arendt, seorang filosof, pemikir sekaligus individu yang memiliki sifat-sifat ketidak-taatan, bahkan kritis dan radikal. Tidak hanya melalui pikiran, penampilannya sejak belia telah menunjukkan karakter wanita yang cenderung menyimpang dari arus pandangan dan kebiasaan umum. Karya-karyanya sejak dekade 1950an mencerminkan hasil eksplorasi intelektual yang serius dan mendalam tentang kejahatan totaliter, tema yang saat itu boleh dikatakan masih jauh dari benak kaum perempuan.

Melalui *The Origin of Totalitarianism*, Arendt dengan tegas menolak peta jalan damai politik yang penuh kejahatan. Radikalisme Arendt bahkan sudah tampak dalam proses studi Totaliterisme itu sendiri, yang akhirnya membuahkan sebuah jejaring pemikiran yang menantang konsep-konsep sebelumnya, yang sudah permanen dalam tradisi pemikiran politik Eropa. Alhasil, sebagian besar universitas ternama di Eropa dan Amerika perlahan-lahan tunduk pada sikap kritisnya.

Tidak hanya berhasil membalikkan kebenaran yang lama bercokol dalam dunia filsafat politik Barat, Arendt juga mempertontonkan sebuah hasrat yang luar biasa, yakni menggali 'harta yang telah lama terpendam' sejak akhir abad XIX: bahwa dalam tradisi pemikiran Barat, para filosof dan kaum intelektual hanya menenggelamkan diri ke dalam penjelajahan teori-teori dan tidak peduli dengan praksis politik sebab yang disebut terakhir sepenuhnya merupakan 'urusan dunia manusia yang kasar dan tak bermartabat' (Rakhmat, 2013). Namun ambivalensi itu akhirnya kelihatan. Fakta-fakta di sekitar

Revolusi Hongaria 1956 agaknya berhasil menggeser proyek pemikiran Arendt untuk perlahan-lahan mulai menyadari bahwa politik dan realitas dunia masih memancarkan unsur perdamaian. Skeptisisme dan Pesimisme tidak selamanya merajai dunia politik dan perubahan zaman. Sebuah optimisme yang memancar di salah satu sudut Eropa Timur membuat teorinya dalam *The Origin* memperoleh negasi, meski pencarian “harta yang hilang” harus berlanjut pada setiap episode sejarah. Lewat *The Human Condition* Arendt mengupas makna political action [dan dalam edisi kedua menambahkan epilog the council system dalam kaitan dengan filsafat kemanusiaan. Sesudah itu Arendt pun mulai menulis *On Revolution*.

Di sana-sininya *On Revolution* lebih tampak sebagai debat reflektif tentang filsafat sejarah. Dimulai dari kritik terhadap metode filsafat post-Kantian yang menempatkan catatan sejarah di bawah bayang-bayang “roh modernitas”. Bagi Arendt metode tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, apabila tidak ingin dikatakan harus dihentikan. Karena bagaimanapun, catatan sejarah tidak boleh mengabaikan unsur spekulatif. Sejarah yang dituliskan bukanlah pengalaman-pengalaman yang baru, nyata dan terpola di hadapan para pemikir, tetapi catatan yang sepenuhnya berhasil memahami tindakan manusia sebagai “aksi” dalam realitas nyata (Supriyanto, 2018).

Filsafat sejarah harus berangkat dari pemahaman yang benar mengenai sejarah (Sardiman, 2015). Dan apakah yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah adalah kilas balik kehidupan manusia yang mesti dipahami secara utuh atau tidak sepele-pengele. Karena hanya dengan melihat sejarah secara utuh, nilai dan makna kehidupan dapat terungkap. Konsekuensi dari dasar pemikiran ini adalah, para pemikir sejarah harus berhasil menorehkan catatan lengkap mengikuti sudut pandang para pelaku. Hanya dengan demikianlah nilai dan keutuhan makna sejarah dapat dipahami. Yang ingin dikatakan melalui riset ini, terutama melalui Fromm dan Arendt, bahwa ketidak-taatan merupakan sejarah kemanusiaan yang otentik, sejauh dapat membalikkan keadaan menjadi lebih baik.

Penelitian ini, untuk sebagian besarnya, telah berhasil membuktikan bahwa sejarah Indonesia modern bukanlah sejarah ketaatan kepada negara. Justru dalam dua periode, negara terlalu kuat. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, negara sama kuatnya. Pada masa Orde Lama, Demokrasi Terpimpin jauh dari kelemahan, kecuali di bidang Ekonomi. Sedangkan pada masa Orde Baru, negara Birokratik Otoriter itu sungguh terlalu kuat. Pada bab pertama telah diterangkan bahwa Prof. BJ Habibie ternyata tidak cukup mampu mengulang kesuksesannya sebagai presiden setelah mengambil alih jabatan dari Soeharto. Dan layak menjadi catatan, meskipun dibesarkan Orde Baru sejak tahun 1978, Jenderal Soeharto tidak bersedia menerima Habibie, atau bahkan berkunjung kepada Habibie. Warganegara tentu melihat itu sebagai contoh bahwa penguasa yang telah berhasil membenamkan akarnya memendam rasa kecewa yang teramat dalam. Tetapi lebih daripada itu dapat dikatakan pula bahwa negara identik dengan kekuasaan. Jika sang mantan penguasa selama 32 (tiga puluh dua) tahun itu tidak dapat menerima sang penguasa de facto, siapakah yang menguasai siapa?

Begitu pula pada masa Presiden Wahid, siapakah yang menguasai siapa? Secara de facto telah terbukti bahwa Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan berhasil memenangkan pemilihan umum tahun 1999. Namun ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, tidak otomatis menjadi presiden sebab kekuasaan tertinggi (masa itu) berada di tangan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang ketua umumnya adalah seorang politisi sipil. Dalam hal ini rakyat terlalu lemah berhadapan dengan sistem pemerintahan yang dibentuk oleh negara.

Megawati Soekarnoputri dilantik pada 23 Juli 2001, menggantikan Presiden Wahid yang dipaksa mengundurkan diri akibat kasus Bulog-gate dan dana bantuan Sultan

Brunei. Dan selama masa pemerintahannya, Megawati harus menyelesaikan kasus Bom Bali I – II yang dahsyat, serta mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai komisi ad hoc (kerja terbatas) yang akan selesai masa kerja pada tahun 2029 (selama 28 tahun). Meskipun masa kerja Presiden Soekarnoputri cukup singkat, tidak ada indikasi bahwa negara memberi peluang pada rakyat untuk berpartisipasi secara terbuka selain saat pemilihan umum.

Tampaknya yang paling dilihat adalah apakah negara bekerja on the track, sedangkan rakyat hanya menonton. Mungkin dalam hal ini tidak ada aturan yang mewajibkan rakyat harus memperlihatkan -kan bahwa warganegara harus taat, selain membayar pajak dan membela negara. Itupun tergantung pada pemerintah dan undang-undang, selain ideologi tentunya. Referendum misalnya adalah hal yang tabu dilakukan warga, meskipun untuk jangka waktu yang singkat. Demikian pula pada saat pemilu, pilpres maupun pilgub tidak pernah mencapai angka di atas 80%. Selanjutnya pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ihwal percitraan pada pemerintah semakin kuat, selain kartel politik dan pembiaran terhadap intoleransi. Sebagaimana kita tahu bahwa citra (apa yang tampak di permukaan) penting bagi seorang presiden, dan itu bukanlah hal yang buruk sejauh tetap bekerja sama baiknya tanpa pencitraan, dan itu pula yang berhasil dilakukan oleh seorang presiden seperti Yudhoyono.

Penelitian ini bukan soal pencitraan. Pada tahun 2006 terbit sebuah buku yang juga menggambarkan bahwa kerjasama pemerintahan SBY bukanlah koalisi melainkan kartel politik. Dalam kosa kata politik, koalisi dibentuk oleh partai-partai yang memiliki kesamaan visi dan platform politik, dan diperjuangkan bersama dalam suatu pengelompokan, baik di parlemen maupun legislatif. Sedangkan kartel politik adalah pengelompokan yang dibuat untuk meminimalisasi perbedaan partai agar memperoleh keuntungan politik baik di parlemen, pemerintahan maupun masyarakat.

Menurut AS Hikam, itulah yang menonjol dalam pemerintahan SBY, baik di pusat maupun daerah. Jelas bahwa “koalisi” yang digunakan dalam pemerintahan SBY bukan demokrasi dalam arti sebenarnya ~ apalagi yang sehat. Tentu, catatan mengenai Civic Virtue harus menjadi yang pertama dalam upaya tersebut. Ketidak-taatan bukanlah ‘peristiwa tertentu’. Bukan pula kisah kemanusiaan biasa yang dapat diformulasikan ke dalam berbagai teori dan sudut pandang pengamat. Ketidaktaatan merupakan aksi kemanusiaan yang otentik, fundamental dan holistik, dengan berbagai kompleksitas proses dan dinamikanya (Siburian, 2017), seperti dijelaskan dalam bagian II penelitian ini. Seluruhnya, paling tidak menurut Hannah Arendt, harus terungkap dengan jelas.

### **Kesimpulan**

Civic Virtue adalah soal Etika menghadapi kekuasaan yang meluas. Civic Virtue adalah moral, sebagaimana ketidak-taatan juga mengandung moralitas yang sama Tidak ada dalam Sejarah Indonesia modern (selama 75 tahun) yang menegaskan persoalan Civic Virtue secara terbuka, kecuali ketaatan membayar pajak, pesta demokrasi (pemilu) dan penggunaan helm, begitu pula buku-buku pelajaran. Sepanjang Orde Lama maupun Orde Baru negara terlalu kuat, dan walaupun negara harus berhadapan dengan warga, Civic Virtue tidak lebih berarti dibandingkan peran dan fungsi negara. Mungkin Civic Virtue tidak perlu dipersoalkan secara terbuka, ataupun rakyat sepenuhnya memang taat kepada putusan-putusan negara melalui aparatnya. Ketaatan Kepada Negara adalah Rasional sejauh menyangkut hati nurani dan tanggung jawab. Kalau berbicara tentang tanggung jawab, berarti didahului oleh kebebasan. Ketidak-taatan juga dimungkinkan dalam peradaban, sejauh alasannya rasional, dan otoritarianism dan telah dibuktikan dalam



pengalaman hidup. Kalau Rasional, berarti akal budi manusia harus berperan dalam ketidak-taatan. Perkembangan teknologi, seperti dibuktikan penelitian ini, membuat manusia tidak taat, mungkin karena globalisasi membukakan persoalan. Penelitian ini perlu disimulasikan lebih leluasa dengan menguji faktor-faktor dan variabelnya pada khalayak lebih luas. Penelitian ini berhasil menjangkau 1555 responden.

### **Bibliografi.**

- Alfianita, Dedeh. (2019). *Peran Organisasi Kemahasiswaan Dalam Meningkatkan Kemampuan Kepemimpinan Mahasiswa (Studi Kasus HMI Komisariat Ushuluddin)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Aziz, Aziz. (2020). Pembelajaran Progresif (Inovasi Baru bagi Masyarakat Multikultural). *Jurnal Literasiologi*, 4(1).
- Hasim, Hasanuddin. (2018). Perkembangan Politik Ketatanegaraan Islam Di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 12(2), 279–296.
- Huseini, Martani. (2016). Globalisasi, Liberalisme dan Neoliberalisme. *Membentuk Identitas Indonesia Dalam Arus Globalisasi*, 38.
- Kariyadi, Dodi. (2017). Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 86–96.
- Latif, Yudi. (2013). *Negara paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marli, Suhardi. (2020). Sejarah dan pendidikan sejarah. *Jurnal Cakrawala Kependidikan*, 9(2).
- Rakhmat, Jalaluddin. (2013). *Psikologi agama: sebuah pengantar*. Yogyakarta: Mizan Pustaka.
- Sardiman, Sardiman. (2015). Menakar Posisi Sejarah Indonesia pada Kurikulum 2013. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 11(2).
- Siburian, Togardo. (2017). Melampaui Politisi, Menuju Negarawan: Refleksi Etis Kristiani. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 4(1), 64.
- Slamet, Achmad. (2016). *Buku Ajar Metodologi Studi Islam: (Kajian Metode Dalam Ilmu Keislaman)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suhendi, Indrawan Dwisetya. (2020). *MERAWAT NALAR DAN BAHASA*. Kalimantan Timur: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawaman.
- Supriyanto, Eko. (2018). *Ikat Kait Impulsif Sarira: Gagasan Yang Mewujud Era 1990-2010*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Yosita, Lucy, & Nurcahya, Yan. (2015). *Strategi perencanaan dan perancangan perumahan pada era kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zainal, Zainal. (2018). Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 11(2).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).